



PERAN KEAMANAN MARITIM DALAM MENGATASI TANTANGAN SOSIAL-EKONOMI MASYARAKAT PESISIR INDONESIA

Hasna Moraina Rizkiyani, Trismadi, Asep Adang Supriyadi,

Pujo Widodo, Herlina Juni Risma Saragih, Panji Suwarno

Program Studi Keamanan Maritim, Fakultas Keamanan Nasional,

Universitas Pertahanan Republik Indonesia

Abstrak

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki kekayaan sumberdaya alam lautan yang melimpah. Namun, dibalik potensi kekayaan tersebut, terdapat realitas kehidupan yang kompleks bagi masyarakat pesisir yang mendiami pesisir dan pulau-pulau kecil. Mereka menghadapi sejumlah tantangan yang unik dan seringkali berat dalam kehidupan sehari-hari mereka, mulai dari keterbatasan akses ke sumber daya, infrastruktur yang kurang memadai, hingga ancaman keamanan seperti penangkapan ikan ilegal dan perompakan. Perjuangan masyarakat pesisir tidak terbatas pada aspek ekonomi semata. Tantangan-tantangan tersebut mencakup berbagai dimensi kehidupan sosial, mulai dari akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan hingga keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan. Dengan memahami kondisi sosial ekonomi masyarakat pesisir sehingga dapat diidentifikasi permasalahan dan dampak sosial ekonomi di masyarakat pesisir, sehingga dapat diperbaiki dan berkontribusi pada pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di wilayah-wilayah pesisir Indonesia.

Kata Kunci: Kekayaan Sumberdaya Alam, Masyarakat Pesisir, Keamanan Maritim.

PENDAHULUAN

Luas wilayah laut Indonesia, yang mencakup dasar laut dan tanah di bawahnya serta wilayah udara di atasnya, telah mengalami peningkatan

yang sangat signifikan. Sebelumnya, luas laut Indonesia hanya sekitar 10.000 kilometer persegi, namun kini telah membesar hingga mencapai sekitar 3.000.000 kilometer persegi. Demikian pula, wilayah udara yang berada di atas

*Correspondence Address : Moraina91@gmail.com

DOI : 10.31604/jips.v11i7.2024. 2781-2787

© 2024UM-Tapsel Press

daratan dan lautan mengalami ekspansi besar-besaran. Dari yang awalnya mencakup sekitar 2.000.000 kilometer persegi, luasnya kini meluas menjadi sekitar 5.000.000 kilometer persegi (Hutagalung, 2017). Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang terdiri dari sekitar 17.506 pulau, tersebar di area perairan seluas sekitar 5,8 juta kilometer persegi. Lokasinya yang sangat strategis menjadikan Indonesia berada di persimpangan penting antara dua samudra besar, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, serta di antara dua benua utama, yaitu Asia dan Australia (Rustam, 2016). Letak geografis yang menguntungkan ini memberikan Indonesia banyak kelebihan baik dalam konteks geopolitik maupun ekonomi. Posisi geografis yang menguntungkan ini memberikan Indonesia berbagai manfaat penting, baik dalam aspek ekonomi, politik, maupun sosial-budaya.

Masyarakat pesisir Indonesia, yang mayoritas menggantungkan hidupnya pada sumber daya laut untuk mata pencaharian sehari-hari, menghadapi berbagai tantangan sosial-ekonomi yang kompleks. Tantangan-tantangan ini mencakup tingginya tingkat kemiskinan, keterbatasan akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan, serta risiko terhadap bencana alam seperti tsunami dan badai tropis. Selain itu, masyarakat pesisir juga rentan terhadap kejahatan maritim, termasuk pencurian ikan oleh kapal-kapal asing, penyelundupan, dan perdagangan manusia, yang semakin memperburuk kondisi sosial-ekonomi mereka.

Keamanan maritim memainkan peran yang sangat penting dalam mengatasi berbagai tantangan yang terjadi di wilayah pesisir. Aspek keamanan ini menjadi fokus penting bagi negara dalam upayanya untuk menjaga dan mengawasi keamanan maritim (Sugianto dkk., 2021), dengan meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum di wilayah laut dan

pesisir, pemerintah dapat melindungi sumber daya laut yang menjadi sumber utama penghidupan masyarakat pesisir dari aktivitas ilegal yang merugikan. Keamanan maritim bukan hanya berfungsi sebagai alat untuk menjaga kedaulatan negara, tetapi juga sebagai fondasi untuk mendukung pembangunan berkelanjutan di wilayah pesisir. Selain itu, dengan keamanan yang terjamin, akses ke pendidikan dan layanan kesehatan dapat lebih mudah diperoleh di daerah pesisir. Sehingga keseluruhan manfaat dapat menciptakan pondasi yang kuat untuk pengembangan masyarakat pesisir yang lebih sejahtera, mandiri dan berdaya saing. Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya tindakan untuk memperkuat keamanan maritim dan mendukung pemberdayaan masyarakat pesisir dengan kebijakan dan program yang dirancang. Selanjutnya, sangat penting untuk menerapkan tata kelola maritim yang terpadu dan komprehensif, serta mengimplementasikan pembangunan berkelanjutan yang diperlukan untuk mengelola sumber daya laut di Indonesia. Langkah ini akan memastikan keberlanjutan ekosistem laut dan keseimbangan lingkungan, serta tujuan akhir yang ingin dicapai adalah memperkuat kedaulatan bangsa dan negara melalui optimalisasi sektor kemaritiman (Bradford, 2005).

Jurnal ini bertujuan untuk menganalisis peran keamanan maritim terhadap kesejahteraan masyarakat pesisir dengan cara mengevaluasi bagaimana peningkatan keamanan maritim dapat mempengaruhi aspek-aspek kesejahteraan sosial-ekonomi dan mengidentifikasi dampak positif serta tantangan yang dihadapi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat pesisir serta jurnal ini dapat memberikan wawasan yang komprehensif mengenai pentingnya keamanan maritim sebagai pondasi bagi

pembangunan keberlanjutan di wilayah pesisir.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kualitatif untuk melakukan analisis mendalam. Studi pustaka berfungsi sebagai sumber data utama, yang mencakup berbagai jenis referensi. Selain itu, penelitian ini memanfaatkan jurnal ilmiah, buku, arsip, surat kabar, sumber daya dari internet, dan publikasi online untuk memperoleh informasi dan data yang relevan. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dan dibandingkan dengan teori-teori yang berguna untuk memastikan kesesuaian dan memperkuat temuan penelitian ini (Pambudhi, 2024). Metode yang digunakan dalam jurnal ini adalah studi pustaka (*library research*), yaitu metode pengumpulan data dengan cara memahami dan mempelajari teori-teori dari berbagai literatur yang relevan dengan topik penelitian (Zed, 2004).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Masyarakat pesisir hidup dalam ketidakpastian yang mendalam, di mana kenyamanan dan keberlangsungan hidup mereka tergantung pada fluktuasi cuaca, iklim, dan permukaan air laut. Saat air laut pasang, mereka seringkali harus menghadapi banjir yang menggenangi tempat tinggal mereka, sehingga menjadikan laut bukan hanya sebagai sumber kehidupan, tetapi juga sebagai sahabat sekaligus ancaman yang konstan. Hidup di bawah garis kemiskinan, mereka sering kali berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti pangan, pakaian, dan tempat tinggal yang layak, sementara juga berjuang untuk mempertahankan mata pencaharian mereka di tengah persaingan yang semakin ketat dan sumber daya yang semakin terbatas (Mutalib dkk, 2023). Saat terjadi pasang air laut, banjir sering kali melanda

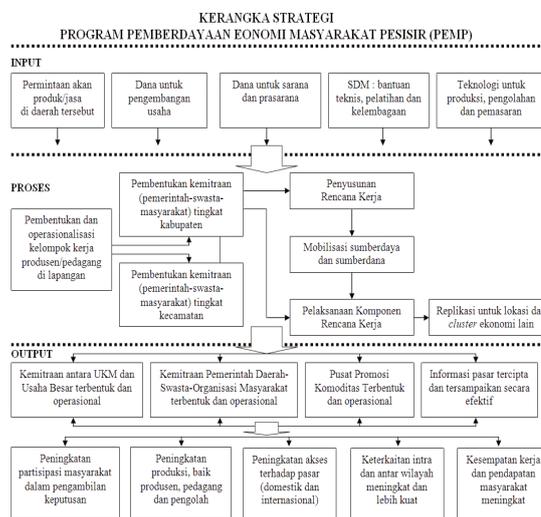
tempat tinggal mereka, yang membuat laut menjadi kawan dan musuh sekaligus. Sebagai bagian dari masyarakat tradisional, para nelayan menghadapi tantangan ekonomi dan sosial yang sangat memprihatinkan (Suharto, 2005).

Potensi kekayaan laut dan wilayah pesisir pantai Indonesia yang begitu besar, namun tampaknya hal ini belum menghasilkan kesejahteraan yang signifikan bagi para nelayan yang tinggal di sekitarnya. Sebaliknya, wilayah pesisir justru menjadi pusat kemiskinan ekstrem di Indonesia, dengan banyaknya kantong-kantong kemiskinan yang terdapat di sana. Tingkat kemiskinan yang tinggi ini mencerminkan tingkat kerentanan sosial-ekonomi yang serius di kalangan masyarakat pesisir. Oleh karena itu, diperlukan perhatian serius dan upaya kolaboratif dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor swasta, untuk mengatasi masalah ini dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan pesisir (Indraswari, 2023). Solusi untuk masalah ekonomi di wilayah pesisir dapat dilakukan dengan peningkatan kemandirian masyarakat pesisir dapat dicapai melalui beberapa langkah strategis. Pertama, mengembangkan kegiatan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, seperti pengembangan usaha mikro dan kecil, serta pemberdayaan kelompok-kelompok ekonomi lokal. Selanjutnya, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) merupakan faktor kunci dalam memperkuat kemampuan masyarakat pesisir untuk mengelola sumber daya secara efisien dan berkelanjutan. Ini melibatkan penyediaan pelatihan dan pendidikan yang relevan dengan kebutuhan local. Selain itu, penguatan modal merupakan langkah penting dalam mendukung perkembangan ekonomi masyarakat pesisir, termasuk

akses terhadap modal usaha, teknologi, dan infrastruktur yang dibutuhkan. Melalui kerja sama yang sinergis, dapat diciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat pesisir secara keseluruhan (Sahudiyono dan Hadna, 2009). **Keamanan maritim** adalah upaya untuk melindungi dan mengawasi wilayah laut dari berbagai ancaman dan aktivitas ilegal yang dapat merusak kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat pesisir. Di Indonesia, yang memiliki wilayah maritim luas dan beragam, keamanan maritim berperan penting dalam mengatasi berbagai masalah sosial ekonomi di wilayah pesisir.

Sejak tahun 2004, Pemerintah meluncurkan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan, sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 tahun 2004. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir dengan fokus pada pengembangan kegiatan ekonomi. Upaya tersebut mencakup peningkatan kualitas kegiatan ekonomi di sektor kelautan dan perikanan secara berkelanjutan, serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga ekosistem laut. Program PEMP menurut Pedoman Umum Program PEMP 2001, Departemen Kelautan dan Perikanan - Direktorat Jenderal Pesisir dan Pulau-pulau Kecil 2001 memiliki tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir dengan cara memberdayakan ekonomi lokal mereka. Peningkatan kesejahteraan ini tidak hanya terbatas pada aspek ekonomi, seperti menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat, tetapi juga mencakup berbagai aspek sosial lainnya. Dalam aspek sosial, program ini menargetkan peningkatan kualitas pendidikan, akses

yang lebih baik ke layanan kesehatan, serta penguatan nilai-nilai agama di komunitas pesisir. Selain itu, Program PEMP juga memperhatikan keberlanjutan lingkungan, khususnya dalam hal pengelolaan sumberdaya perikanan dan laut, sehingga ekosistem tetap terjaga dan dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan oleh generasi mendatang. Tidak ketinggalan, program ini juga berfokus pada peningkatan kualitas pemukiman dan pengembangan infrastruktur, yang sangat penting untuk mendukung kehidupan sehari-hari masyarakat pesisir. Dengan pendekatan yang komprehensif ini, diharapkan masyarakat pesisir dapat mencapai kesejahteraan yang lebih holistik dan berkelanjutan. Kerangka strategi PEMP biasanya mencakup beberapa komponen penting yang saling terkait dan terintegrasi untuk mencapai tujuan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Berikut ini adalah gambar dari komponen utama kerangka strategi tersebut:



Gambar 1. Kerangka Strategi Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (PEMP)

Berikut contoh program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Semarang Tahun 2013 :

Tabel 1. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Dinas Kelautan Dan Perikanan Kota Semarang Tahun 2013

KEGIATAN	PEKERJAAN	LOKASI
1. Pembinaan Kelompok Ekonomi Masyarakat Pesisir	<ul style="list-style-type: none"> • Bibit Mangrove • Website KKMKS • APO • GBPL 	Kota Semarang
2. Penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Kota Semarang	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen Perencanaan Zonasi Wilayah Pesisir Kota Semarang 	Kota Semarang
3. Hibah atau bantuan sosial bagi masyarakat di Wilayah Pesisir	<ul style="list-style-type: none"> • Pemberian Bantuan Sosial sesuai dengan pengajuan proposal dari masyarakat 	Kota Semarang
4. Rencana Pengembangan Pengelolaan Wilayah Pesisir	<ul style="list-style-type: none"> • Grand Design Pengelolaan dan Pengembangan Mangrove • Rencana pengadaan lahan Konservasi • Rencana pengembangan wisata bahari 	Kota Semarang

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Semarang 2013

Pada penelitian yang dilakukan Saputra dkk, (2014), implementasi dari Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir di Kelurahan Mangunharjo Semarang sesuai dengan Program PEMP Dinas Kelautan dan Perikanan Semarang karena telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat setempat. Program ini dianggap tepat dan sangat relevan dengan kebutuhan mereka, karena berhasil memberikan dampak positif terhadap peningkatan perekonomian lokal. Salah satu kegiatan utama dalam program ini adalah penanaman bibit mangrove, yang memiliki multifungsi bagi masyarakat pesisir. Penanaman mangrove tidak hanya berfungsi sebagai pelindung alami terhadap erosi pantai dan gelombang laut, tetapi juga sebagai sumber bahan baku untuk berbagai produk olahan yang bernilai ekonomis tinggi. Selain itu, program ini juga telah meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan pesisir, sehingga tercipta sinergi antara upaya konservasi lingkungan dan peningkatan kesejahteraan ekonomi. Saran dalam penelitian tersebut adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Semarang perlu menyusun Standar Operasional

Prosedur (SOP) yang jelas dan rinci untuk Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir. SOP ini penting untuk memastikan bahwa setiap aspek dari program tersebut dapat dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan standar yang telah ditentukan, sehingga program dapat berjalan dengan maksimal dan memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat pesisir.

Selain masalah ekonomi, adapun masalah sosial yang dialami oleh masyarakat pesisir misalnya kurangnya akses terhadap layanan sosial seperti pendidikan yang berkualitas, perawatan kesehatan yang terjangkau, dan perumahan yang layak menjadi tantangan utama yang dihadapi oleh banyak komunitas pesisir. Salah satu upaya Pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat pesisir adalah dengan meningkatkan infrastruktur sosialnya. Menurut World Bank (1994), Infrastruktur sosial adalah jenis infrastruktur yang bertujuan untuk mendukung pembangunan manusia dan lingkungan sekitarnya, termasuk di dalamnya pendidikan, layanan kesehatan, perumahan, dan fasilitas rekreasi. Infrastruktur sosial adalah elemen penting dalam pembangunan yang berfokus pada peningkatan kualitas hidup manusia.

Keterbatasan masyarakat pesisir ini tidak hanya memengaruhi kemampuan individu untuk meningkatkan taraf hidup mereka, tetapi juga menciptakan lingkungan yang kurang sehat dan tidak aman bagi penduduk setempat. Tanpa akses yang memadai terhadap pendidikan, individu mungkin kesulitan untuk memperoleh keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk bersaing dalam pasar kerja atau mengembangkan usaha mereka sendiri. Begitu juga dengan akses terhadap perawatan kesehatan yang terbatas, ini dapat menyebabkan

penundaan dalam diagnosis dan pengobatan penyakit, meningkatkan risiko penyakit yang lebih serius, dan menghambat produktivitas dan kualitas hidup. Terlebih lagi, ketika infrastruktur perumahan tidak memadai, individu rentan terhadap kondisi lingkungan yang tidak sehat dan risiko keamanan yang tinggi, termasuk kemungkinan terkena bencana alam atau konflik sosial. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan lembaga terkait untuk bekerja sama dalam meningkatkan aksesibilitas terhadap layanan sosial di komunitas pesisir guna memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk hidup yang lebih baik dan lebih berkelanjutan (Kaida dan Toban, 2023). Untuk mengatasi tantangan ini dapat dilakukan dengan mempertimbangkan program bantuan sosial, implementasi program bantuan sosial yang ditunjukkan membantu individu dan keluarga yang berada dalam kondisi renta, seperti program bantuan makanan, beasiswa Pendidikan, dan bantuan perumahan. Dengan adanya Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaran Program Keluarga Harapan. Program Keluarga Harapan (PKH) adalah salah satu program bantuan sosial yang diselenggarakan oleh pemerintah Indonesia. Program ini bertujuan untuk memberikan bantuan kepada keluarga miskin dan rentan, termasuk di antaranya masyarakat pesisir.

Pemerintah telah membuat beberapa program dengan upaya untuk menciptakan lingkungan keamanan maritim yang stabil dan kondusif bagi kegiatan ekonomi di wilayah pesisir. Keamanan yang terjaga dengan baik di wilayah pesisir akan meningkatkan kepercayaan investor dan pengusaha lokal. Seiring dengan peningkatan investasi maka pendapatan masyarakat pesisir pun meningkat jika lapangan kerja dan berkembangnya sektor

ekonomi lokal. Penghasilan tambahan memungkinkan Masyarakat untuk berinvestasi dalam Pendidikan, Kesehatan, dan perbaikan infrastruktur lokal, dengan demikian akan memperkuat fondasi ekonomi dan sosial untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir secara keseluruhan.

KESIMPULAN

Dari pembahasan tentang tantangan dan Solusi kehidupan sosial ekonomi Masyarakat pesisir dapat disimpulkan bahwa keberadaan mereka untuk menghadapi rintangan kehidupan sangat kompleks. Dari segi ekonomi hingga kesejahteraan sosial Masyarakat pesisir harus berjuang dan berkembang di lingkungan yang keras dan dinamis. Ditengah tantangan tersebut Masyarakat pesisir memiliki Upaya dan inisiatif yang menginspirasi untuk Solusi-solusi rintangan yang mereka hadapi. Contohnya melalui Kerjasama antara pemerintah, organisasi non pemerintah dan Masyarakat lokal untuk memulai program Pembangunan ekonomi dan sosial diwilayahnya. Pentingnya untuk memberikan perhatian dan dukungan kepada Masyarakat pesisir, baik dalam infrastruktur layanan Kesehatan, Pendidikan maupun program-program bantuan sosial. Dengan demikian mereka dapat mengatasi tantangan-tantangan yang dihadapi dan meningkatkan kualitas hidup mereka untuk Pembangunan berkelanjutan dan inklusif diwilayah pesisir Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Bradford, L. J. F. (2005). *The Growing Prospects for Maritime Security Cooperation in Southeast Asia*. *Naval War College Review*, 58(3): 63-86.

Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Semarang, 2013. Laporan Akhir: Pemetaan Potensi, Kerusakan, Model Rehabilitasi Kawasan

Pesisir Kota Semarang. Semarang : Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Semarang

Hutagalung, S., M. (2017). *Penetapan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI): Manfaatnya dan Ancaman Bagi Keamanan Pelayaran di Wilayah Perairan Indonesia*. Jurnal Asia Pasifik Studies, 1(1): 75-91.

Indraswari, Debora Laksmi. (2023). Ironi Kemiskinan Wilayah Pesisir yang Kaya Potensi Ekonomi Kelautan. Kompas. Diunduh di

[https://www.kompas.id/baca/riset/2023/01/25/ironi-kemiskinan-wilayah-pesisir-yang-kaya-potensi-ekonomi-kelautan tanggal 1 Juni 2024](https://www.kompas.id/baca/riset/2023/01/25/ironi-kemiskinan-wilayah-pesisir-yang-kaya-potensi-ekonomi-kelautan-tanggal-1-juni-2024).

Kaida, J. dan Toban, E. T. (2023). *Inovasi Pendidikan Dan Pelatihan Sumber Daya di Daerah Pesisir*. Universitas Hasanudin. *Riset Sains Dan Teknologi Kelautan*. SENSISTEK, 6(2): 222-226.

Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18/KEPMEN/2004 tentang Perikanan.

Mutalib., Syaifudin, S. K., & Bakri, Y. (2023). *Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Sebagai Upaya Meningkatkan Kesejahteraan*. Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial, 4(2): 12-24.

Rustam, Ismah. (2016). *Tantangan ALKI dalam Mewujudkan Cita-cita Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia*. Indonesian Perspective, 1(1): 1-21.

Sahudiyono & Hadna, A. H. (2009). *Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) di Wilayah Pesisir Kabupaten Bantul : Studi Implementasi Program PEMP pada Dinas Peternakan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul*. Universitas Gadjah Mada.

Saputra, Sefryan Ardi., Margaretha, Suryaningsih., & Dewi Rostyaningsih. (2014). *Implementasi Program, Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir di Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Tugu Kota Semarang*. Semarang: *Ejournal Undip Jurusan Administrasi Publik*, 3 (2).

Sugianto, A., Agussalim, D., & Armawi, A. (2021). *Penanganan Keamanan Maritim Perbatasan Wilayah Laut dan Dampaknya pada Aspek Pertahanan Keamanan (Studi di Wilayah Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau)*. Jurnal Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, 9(2): 113-128.

Suharto, Edi. (2005). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, Kajian Strategis Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Bandung: Refika Aditama.

Pambudhi, N. A. (2024). *Analisis Ibukota Negara Baru dan Dampaknya Terhadap Anggaran Pertahanan*. Jurnal Kewarganegaraan, 8(1): 70-79.

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaran Program Keluarga Harapan.

World Bank. (1994). *World Development Report: Infrastructure For Development*. Oxford University Press, New York.

Zed, Mestika. 2004. *Metode Penelitian*. Kepustakaan, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.